BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pertambangan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi dan daya dukung sumber daya mineral untuk pembangunan Daerah, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kapubaten Cianjur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Wilayah Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 116);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

5. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertambangan.
6. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
8. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Jawa Barat.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpasca tambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
13. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat batas administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
14. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional
15. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
16. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
17. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagiandari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
18. Wilayah Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WIPR, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IPR.
19. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan

21. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang dlberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
22. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
23. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
24. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran,kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
25. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
26. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai denganhasil studi kelayakan.
27. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
28. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
29. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
30. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
31. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
32. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL,adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ ataukegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

35. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan /atau kegiatan.
36. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
37. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
38. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
39. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
40. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif,agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
41. Inspektur tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
43. Rencana Kegiatan Anggaran Belanja yang selanjutnya disebut RKAB adalah dokumen yang berisi rencana teknis dan pembiayaan dari masing-masing komponen kegiatan sesuai tahapan pertambangan yang direncanakan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola dengan memperhatikan asas:

a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan mineral bertujuan:

a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;

b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;

d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan

f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III

PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 4

(1) Mineral sebagai sumber daya yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

(2) Penguasaan mineral oleh negara sebagaimana dimaksud padaayat (1) di wilayah Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan prioritas dan komoditas mineral untuk kepentingan Daerah dalam pengendalian produksi dan ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral antara lain adalah:

a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;

b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral ;

d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral , serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;

e. penyusunan neraca sumber daya mineral pada wilayah kabupaten;

f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian

g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;

h. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian,serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;

i. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;

j. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan

k. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Penyelidikan dan Penelitian
Pasal 6

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi.

(2) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, apabila:

a. tidak berpotensi lintas wilayah Kabupaten/Provinsi; dan/atau

b. berpotensi untuk dikembangkan.

(3) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:

a. identifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung indikasi dan endapan mineral;

b. informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan dan aksesibilitas daerah;

c. kondisi lingkungan geologi;

d. aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;

e. status legalitas;

f. lingkungan hidup.

Pasal 7

(1) Data hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikumpulkan dan diolah sesuai dengan standar nasional pengolahan data geologi oleh Bupati.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi antara lain:

a. peta geologi yang antara lain memuat formasi batuan pembawa mineralisasi logam;

b. evaluasi data perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada pemerintah daerah;

c. evaluasi data geologi yang berasal dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembali kepada pemerintah daerah;

d. peta geokimia dan/atau peta geofisika; dan

e. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

(3) Bupati wajib menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambangan kepada Menteri dan Gubenur.

Pasal 8

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi dan melakukan inventarisasi data hasil eksplorasi.

(2) Data hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi antara lain :

a. peta, yang terdiri dari atas :

1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
2. peta geokimia dan peta geofisika,

b. bentuk dan sebaran estimasi sumberdaya dan cadangan.

(3) Bupati wajib menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambangan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 9

Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi Dinas dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset Negara dan/atau Daerah.

Pasal 11

Bupati dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi hasil pelaksanaan

Pasal 13

Hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi termasuk peta wilayah potensi pertambangan dievaluasi dan digunakan sebagai bahan penetapan WP.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 14

(1) Setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan merupakan milik Pemerintah Daerah.

(2) Pengelolaan data diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.

(2) Pengelolaan data dilakukan dalam sistem informasi geografis dengan koordinat pemetaan menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.

(3) Pemanfaatan data digunakan untuk:

a. penetapan klasifikasi potensi dan WP.

b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral , atau

c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral.

Bagian Ketiga

Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral.

(2) Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral.

(3) Hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

(4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB V

WILAYAH PERTAMBANGAN, PENGELOMPOKAN USAHA PERTAMBANGAN, DAN GOLONGAN KOMODITAS TAMBANG

Pasal 17

(1) Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

(2) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. WUP;

b. WPR;

c. WPN.

Pasal 18

Pertambangan mineral digolongkan atas:

a. pertambangan mineral radioaktif;

b. pertambangan mineral logam;

c. pertambangan mineral bukan logam; dan

d. pertambangan batuan.

Pasal 19

Penggolongan komoditas dalam pertambangan mineral terdiri atas 4(empat) golongan sebagai berikut:

a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;

b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium,telluride, stronium, germanium, dan zenotin;

c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; dan

d. mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanahdiatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon,chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasiralami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanahmerah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandungunsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB VI
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

(1) Setiap usaha pertambangan di Kabupaten Cianjur harus mendapat Izin dari Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP).

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pasal 21

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diberikan melalui tahapan:

a. pemberian WIUP; dan

b. pemberian IUP.

Bagian Kedua
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

(1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

a. WIUP mineral logam;

b. WIUP mineral bukan logam; dan/atau

c. WIUP batuan.

(2) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

(3) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.

(5) Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka *(go public)* dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2

Pemberian WIUP Mineral Logam

Pasal 23

(1) WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang.

(2) Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

(3) Biaya pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, kecuali terhadap biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan.

(4) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada peserta lelang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan lelang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 24

(1) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

(2) Permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta mendapat prioritas pertama untukmendapatkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan serta biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta diatur dengan PeraturanBupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

(1) IUP terdiri atas dua tahap:

a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 26

IUP diberikan kepada:

a. badan usaha;

b. koperasi; dan

c. perseorangan.

Pasal 27

(1) Badan usaha, koperasi, dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang mengajukan permohonan IUP wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :

a. nama perusahaan;

b. lokasi dan luas wilayah;

c. status hak atas tanah;

d. rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau rencana detail tata ruang (RDTR);

e. jaminan kesungguhan;

f. modal investasi;

g. perpanjangan waktu tahap kegiatan;

h. hak dan kewajiban pemegang IUP;

i. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;

j. jenis usaha yang diberikan;

k. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

l. perpajakan;

m. penyelesaian perselisihan;

o. amdal atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukkannya.

(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

a. nama perusahaan;

b. luas wilayah;

c. lokasi penambangan;

d. status hak atas tanah;

e. rencana umum tata ruang;

f. lokasi pengolahan dan pemurnian;

g. pengangkutan dan penjualan;

h. modal investasi disertai dengan laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;

i. jangka waktu berlakunya IUP;

j. jangka waktu tahap kegiatan;

k. penyelesaian masalah pertanahan;

l. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;

m. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;

n. perpanjangan IUP;

o. hak dan kewajiban pemegang IUP;

p. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayahpertambangan;

q. perpajakan;

r. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;

s. penyelesaian perselisihan;

t. keselamatan dan kesehatan kerja;

u. konservasi mineral ;

v. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;

w. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;

x. pengembangan tenaga kerja Indonesia;

y. pengelolaan data mineral ;

z. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral ; dan

aa. memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi dan memperoleh rekomendasi dinas teknis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

(5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

(6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Pasal 30

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Paragraf 2

IUP Eksplorasi

Pasal 31

(1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.

(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

(3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 32

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 33

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 34

(1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 2(dua) hektare dan paling hanyak 5.000 (lima ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 35

(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 36

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3

IUP Operasi Produksi

Pasal 37

(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 38

IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam 1 (satu)

Pasal 39

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 40

(1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.

Pasal 41

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2(dua) kali wajib mengembalikan wilayah pertambangan kepada Bupati.

Pasal 42

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :

a. peta dan batas koordinat wilayah;

b. bukti pelunasan iuran tetap dan pajak produksi/iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;

c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;

d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan

f. neraca sumber daya dan cadangan.

(2) Bupati dapat meminta penjelasan perpanjangan IUP Operasi Produksi kepada pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan evaluasi pemegang IUP Operasi Produksi telah melaksanakan kewajiban operasi produksi yang baik.

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

(4) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.

(2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUPnya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak yang sama.

Pasal 44

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare dan paling sedikit 2 (dua) hektar

(3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare dan paling sedikit 2 (dua) hektar

(4) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan diberi WIUP dengan luas dibawah 2 (dua) hektar dengan kriteria :

a. penduduk setempat dan tanah milik sendiri;

b. tidak menggunakan alat berat atau manual.

Pasal 45

(2) Mineral yang tidak termasuk mineral tertentu dapat diolah dan/atau dimurnikan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.

(3) Yang termasuk dalam mineral tertentu adalah seluruh mineral logam, seluruh mineral bukan logam, seluruh mineral batuan kecuali pasir urug, pasir pasang, sirtu, tanah, urukan tanah setempat.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi Bupati.

Bagian Keempat

Hak Dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 47

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 48

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.

(2) Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :

a. harus memberitahu kepada Bupati; dan

b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 51

Pemegang IUP wajib:

a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;

b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;

d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan

e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 52

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, pemegang IUP wajib melaksanakan:

a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;

b. keselamatan operasi pertambangan;

c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;

d. upaya konservasi sumber daya mineral ;

e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, air, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 53

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, pemegang IUP juga wajib:

a. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Kabupaten Cianjur.

b. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Perseorangan, Koperasi atau Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud mengangkut dan menjual mineral atau mengolah dan pemurnian harus terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian.

(2) Perseorangan, koperasi atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil pengangkutan penjualan atau pengolahan pemurnian kepada Bupati.

Pasal 56

(1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukanoleh pihak lain yang memiliki:

a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;

b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau

c. IUP Operasi Produksi.

(2) Pihak lain yang dimaksud ayat (1) dapat berbentuk :

a. perseorangan

b. koperasi

c. badan usaha

Pasal 57

(1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.

(2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari wilayah Daerah dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.

Pasal 60

(1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat desa setempat.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham badan usaha pemegang IUP wajib melaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan

Pasal 63

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Pasal 64

(1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

(1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha swasta nasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kemitraan

Pasal 66

(1) Setiap pemegang IUP wajib mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangannya berdasarkan konsep kemitraan.

(2) Masyarakat yang diikutsertakan dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung di dalam koperasi atau kelompok masyarakat yang

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsep kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

WPR ditetapkan berdasar kriteria, antara lain:

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;

b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;

c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;

d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare ;

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;

f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas tahun);

g. tidak tumpang tidih dengan WUP dan WPN;dan/atau

h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 68

(1) Dalam menetapkan WPR, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana penetapan WPR, kepada masyarakat secara terbuka.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah, Desa dan/atau media massa.

Pasal 69

(1) Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.

(2) Wilayah atau lokasi pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

(3) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Menteri dan Gubernur.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.

Pasal 70

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:

a. pertambangan mineral logam;

b. pertambangan mineral bukan logam; dan/atau

c. pertambangan batuan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan rakyat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. kedalaman sumuran dan terowongan pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

b. penggunaan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* (HP) untuk1 (satu) IPR; dan

c. tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

Bagian Kedua

Wilayah Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 72

(1) WIPR diberikan oleh Bupati dan diprioritaskan bagi pemohon pertama yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Bupati menetapkan 1 (satu) atau beberapa IPR dalam 1 (satu) WIPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baikperseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 73

(1) IPR diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan daerah.

(2) Pemberian IPR diutamakan bagi penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

(3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada:

a. perseorangan paling banyak 1 (satu) ha;

b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha; dan/ atau

(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing satu tahun.

Pasal 75

(1) IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral dalam 1 (satu) WIPR disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.

(2) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIPR yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

(3) Pemegang IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IPR baru kepada Bupati.

(4) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

(5) Pemegang IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

(6) IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban pemegang IPR

Pasal 76

Pemegang IPR berhak:

a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah; dan

b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 77

Pemegang IPR wajib:

a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi teknis pengelolaan pertambangan yang berlaku;

c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;

d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.

Pasal 78

(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat Pemegang IPR wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:

a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. pengelolaan lingkungan hidup; dan

c. reklamasi dan pascatambang.

(3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mengangkat pejabat fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secaraberkala kepada Gubernur dan Menteri.

BAB VIII

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 80

(1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.

(2) Atas permohonan penciutan atau pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP harus menyerahkan :

a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;

b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;

c. tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;

d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;

e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penciutan atau pengembalian wilayah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 81

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila :

a. keadaan kahar;

b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;

c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.

(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.

(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.

(5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 82

(1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1)huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.

(3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 83

(1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.

(2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

(3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB X
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 84

IUP dan IPR berakhir karena:

a. dikembalikan;

b. dicabut; atau

c. habis masa berlakunya.

Pasal 85

(1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati atau dan setelah Pemegang IUP atau IPR memenuhi kewajibannya.

Pasal 86

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila:

a. Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang- undangan;

b. Pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau

c. Pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

d. Pemegang IUP atau IPR atas nama perorangan telah meninggal dunia.

Pasal 87

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IPR tersebut berakhir.

Pasal 88

(1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dikembalikan kepada Bupati.

(2) WIUP atau WIPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XI

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 90

(1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Khusus perusahaan jasa pertambangan nasional dan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia harus memperoleh persetujuan dari Dinas/Instansi yang membidangi pertambangan.

(4) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:

a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:

1. penyelidikan umum;
2. eksplorasi;
3. studi kelayakan;
4. konstruksi pertambangan;
5. pengangkutan;
6. lingkungan pertambangan;
7. pascatambang dan reklamasi; dan/ atau
8. keselamatan dan kesehatan kerja.

b. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang :

1. penambangan; atau
2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 91

(1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.

(2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi ,atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 92

(1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.

(2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:

a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; dan/atau

b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

BAB XII

PAJAK NEGARA DAN DAERAH

Pasal 93

(1) Pemegang IUP atau IPR wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah

(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan

b. bea masuk dan cukai

(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terdiri atas :

a. iuran tetap;

b. iuran eksplorasi;

c. iuran produksi, dan;

d. kompensasi data informasi

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. iuran tetap (landrent);

b. iuran produksi (royalti);

d. pendapatan lain yang sah.

(6) Kewajiban pembayaran pendapatan daerah bagi pemegang IUP bukan logam dan batuan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ayat (5) huruf c, ayat (5) huruf d.

(7) Kewajiban pembayaran pendapatan daerah bagi pemegang IPR bukan logam dan batuan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ayat (5) huruf b.

(8) Pemegang IUP dan IPR logam wajib membayar pendapatan negara adalah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, b dan c

(9) Ketentuan pembayaran Iuran tetap (landrent) dan iuran produksi (royalti) sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan c berpedoman pada peraturan perundang undangan

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran iuran tetap (landrent) dan iuran produksi (royalti) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

(11) Pengenaan pajak produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur yang mengatur tentang pajak daerah.

(12) Pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d merupakan sumbangan pihak ketiga, atau bentuk lainnya yang sah.

(13) Prinsip dasar dalam pengenaan pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah pemanfaatan lahan dan bahan galian, dan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya pemberian izin, pembinaan, pengawasan serta pengendalian.

BAB XIII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 94

(1) Hak atas WIUP atau WIPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 95

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah pada tanah yang diusahakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan.

Pasal 96

(1) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 97

Pemegang IUP atau IPR yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 99

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Paragraf 1

Pengawasan IUP dan IPR

Pasal 100

(1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

a. teknis pertambangan;
b. pemasaran;
c. keuangan;
d. pengolahan data mineral ;
e. konservasi sumber daya mineral ;
f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g. keselamatan operasi pertambangan;
h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
j . pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
m. kegiatan - kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
n. pengelolaan IUP dan/atau IPR; dan
o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f,huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

(1) Pengawasan pengelolaan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf n, meliputi antara lain.
a. prosedur perizinan, meliputi eksplorasi dan operasi produksi;
b. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

(2) Pengawasan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain tahap penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

(3) Pengawasan pelaksanaan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain konstruksi, operasi produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

(4) Pengawasan pengelolaan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Bupati.

Pasal 102

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat dilakukan secara administratif dan operasional.

(2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

b. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

(3) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pengawasan langsung seluruh kegiatan di lapangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan IUP atau IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Inspektur Tambang

Pasal 104

(1) Inspektur Tambang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan pengujian di bidang pertambangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang mempunyai kewenangan:

a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;

b. menghentikan atau menutup untuk sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

c. mengusulkan penutupan secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada kepala Inspektur Tambang.

(3) Inspektur Tambang melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan melalui:

a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;

b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu;

c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

(4) Untuk diangkat menjadi Inspektur Tambang harus memenuhi persyaratan jabatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kepala Teknik Tambang

Pasal 105

(1) Setiap pemegang IUP harus memiliki Kepala Teknik Tambang sebelum memulai kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi.

(2) Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib

Bagian Ketiga

Perlindungan Masyarakat

Pasal 106

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 107

(1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun bersama masyarakat setempat dan dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah.

(3) Apabila pemegang IUP tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka masyarakat dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada Pemegang IUP.

(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat kegiatan pertambangan.

(5) Prioritas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.

(6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pos biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang disediakan oleh Pemegang IUP melalui anggaran dan biaya setiap tahun.

(7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 108

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada

Pasal 109

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 111

(1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

(2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan.

(3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

(4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib memenuhi prinsip:

a. lingkungan hidup pertambangan;

b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan

c. konservasi mineral.

Pasal 112

Prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111ayat (4) huruf a, meliputi antara lain:

a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, pertambangan mineral , air laut, dan tanah serta udara sesuai dengan standart baku mutu lingkungan;

b. perlindungan keanekaragaman hayati;

c. penciptaan stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan *(man-made structure)* lainnya;

d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan

e. penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Pasal 113

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) huruf b, meliputi antara lain:

a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan

b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

Pasal 114

Prinsip-prinsip konservasi mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111ayat (4) huruf c meliputi antara lain:

a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;

b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;

c. pendataan sumberdaya cadangan mineral yang tidak tertambang serta sisa pengolahan atau pemurnian.

Pasal 115

(1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.

(2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud padaayat (1) disusun oleh pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:

a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4);

b. peraturan perundang-undangan yang terkait;

c. sistem dan metode penambangan;

d. kondisi spesifik daerah.

Bagian Kedua

Rencana Reklamasi

Pasal 116

(1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci dalam tiap tahun.

(2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.

(3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

b. pembukaan lahan;
c. program reklamasi; dan
d. biaya reklamasi.

Bagian Ketiga

Rencana Pascatambang

Pasal 117

(1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, meliputi antara lain:
a. profil wilayah;
b. deskripsi kegiatan pertambangan;
c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang;
d. kriteria keberhasilan;
e. program pascatambang;
f. organisasi; dan
g. biaya pascatambang.

(2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konsultasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat.

Bagian Keempat

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 118

(1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana reklamasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana reklamasi.

(2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atau diberikan tanpa saran penyempurnaan, maka rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 119

(1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas 1 (satu) atau lebih hal-hal sebagai berikut:
a. sistem penambangan;
b. tingkat produksi;
c. umur tambang;
d. tata guna lahan;
e. AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan.

(2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.

(3) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya perubahan rencana reklamasi.

Bagian Kelima

Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 120

(1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencanapascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejakmenerima rencana pascatambang.

(2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja atau diberikan tanpa saran penyempurnaan, rencana pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 121

(1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi.

(2) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya perubahan rencana pascatambang.

(3) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus sudah disetujui 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan pascatambang.

Bagian Keenam

Pelaksanaan

Pasal 122

(1) Pemegang IUP atau IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus dipimpin oleh seorang Kepala Teknik Tambang.

(3) Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk dan mengangkat petugas reklamasi dan pascatambang yang kompeten.

Pasal 123

(2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi

Pasal 124

(1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.

(2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.

(3) Lahan yang tidak digunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan yang ditinggalkan sementara dan/atau permanen.

(4) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:

a. timbunan tanah penutup;

b. timbunan bahan baku/produksi;

c. jalan transportasi;

d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;

e. kantor dan perumahan; dan/atau

f. pelabuhan.

(5) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi.

(7) Kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan PeraturanBupati.

Pasal 125

Dalam hal pelaksanaan reklamasi terdapat di dalam kawasan hutan, maka perencanaan dan pelaksanaan reklamasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan dan Pelaporan Pascatambang

Pasal 127

(1) Pelaksanaan pascatambang untuk pemegang IUP wajib dilakukan setelah sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan di dalam dan/atau di luar WIUP berakhir.

(2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui, pemegang IUP wajib melaksanakan pascatambang pada lahan terganggu.

(3) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kegiatan pertambangan berakhir.

(4) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang.

(5) Kriteria keberhasilan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 128

Pemegang IUP atau IPR wajib menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Bagian Kesembilan

Jaminan

Paragraf 1

Umum

Pasal 129

(1) Pemegang IUP wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan perhitungan rencana biaya Pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang ditentukan.

(3) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2

Jaminan Reklamasi

Pasal 130

b. bank garansi atau asuransi; atau

c. cadangan akuntansi (*Accounting Reserue*).

Pasal 131

(1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 harus dapat menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.

(2) Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.

(3) Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan besarnya jaminan reklamasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 132

(1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi.

(2) Dalam hal jaminan reklamasi yang telah ditetapkan tidak dapat menutupi penyelesaian reklamasi, maka kekurangan biaya reklamasi tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Pasal 133

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi kepada Bupati setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Pascatambang

Pasal 134

Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk Deposito Berjangka.

Pasal 135

(1) Jaminan pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.

(2) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.

(3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pascatambang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata

b. bank garansi atau asuransi; atau

c. cadangan akuntansi (*Accounting Reserue*).

Pasal 131

(1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 harus dapat menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.

(2) Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.

(3) Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan besarnya jaminan reklamasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 132

(1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi.

(2) Dalam hal jaminan reklamasi yang telah ditetapkan tidak dapat menutupi penyelesaian reklamasi, maka kekurangan biaya reklamasi tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Pasal 133

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi kepada Bupati setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Pascatambang

Pasal 134

Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk Deposito Berjangka.

Pasal 135

(1) Jaminan pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.

(2) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.

(3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pascatambang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan besarnya

Pasal 136

(1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan pascatambang berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang dengan menggunakan jaminan pascatambang.

(2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui maka pemegang IUP wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

(3) Dalam hal jaminan pascatambang yang telah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya pascatambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Pasal 137

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan dana jaminan pascatambang kepada Bupati setelah kegiatan pasca tambang dinyatakan selesai dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR

Pasal 138

(1) Pemegang IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

(2) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang bagi pemegang IPR.

Bagian Kesebelas

Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 139

(1) Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan Bupati dapat menugaskan Dinas yang membidangi pertambangan dan/atau Inspektur Tambang.

(3) Dinas dan atau Inspektur Tambang dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Keduabelas

Penyerahan Lahan Pascatambang

Pasal 140

(1) Pemegang IUP yang telah melaksanakan reklamasi atau pascatambang dapat menyerahkan lahan yang telah direklamasi atau lahan pascatambang kepada Bupati.

(2) Dalam hal lahan pascatambang yang telah diserahkan masih memerlukan pemeliharaan dan/atau pemantauan jangka panjang Bupati dapat memerintahkan kepada pemegang IUP untuk menempatkan dana amanah (*trust fund*).

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 141

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 35,Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51,Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 59,Pasal 60, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), Pasal 65ayat(1), Pasal 66, Pasal 71, Pasal 75 ayat (3), Pasal 77, Pasal 78,Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1),Pasal 97, Pasal 105, Pasal 107 ayat (1), Pasal 108, Pasal 109, Pasal 111 ayat(1), Pasal 115, Pasal 119 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122, Pasal 124 ayat (1) dan (5), Pasal 126, Pasal127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 138dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau

c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 142

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakpidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral, sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan pertambangan mineral tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan pertambangan mineral;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral ;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 143

Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah, dan Surat Izin Pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin serta wajib:

a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PeraturanDaerah ini;

b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan (KP) dan surat ijin pertambangan daerah (SIPD) sampai dengan jangka waktu berakhirnya kepada Bupati;

c. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral.

Pasal 144

Permohonan IUP yang diajukan kepada Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 145

Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Inspektur Tambang, maka tugas dan wewenang Inspektur Tambang dilaksanakan oleh Tim dari Pemerintah Daerah yang bertugas di bidang pengawasan pertambangan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005 Nomor 01 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 147

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA CIANJUR

BACHRUDDIN ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 6